

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Emisi karbon adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran senyawa yang mengandung karbon, dan merupakan salah satu penyebab terjadinya gas rumah kaca di atmosfer, yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Aktivitas operasional perusahaan menghasilkan emisi karbon, sehingga untuk mengurangi dampak lingkungan terkait perubahan iklim, diharapkan perusahaan mengungkapkan semua aktivitas yang berkontribusi pada perbaikan iklim. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*), yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih baik (Khotimah & Sari, 2024).

Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif emisi karbon, seperti kebakaran yang terjadi pada tahun 2023 di Palembang dan pencemaran lingkungan yang diakibatkannya, respons positif dari investor dan calon investor terhadap pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan dan keberlanjutan menjadi semakin penting. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memengaruhi persepsi terhadap perusahaan (Fitriana et al., 2024). Di Indonesia, regulasi seperti (POJK, 2017) tentang Keuangan Berkelanjutan semakin mendorong pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan swasta.

Dampak dari kebijakan lingkungan ini sangat terasa pada sektor-sektor industri yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor energi dan manufaktur merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian (Linda Anisa Rahmawaty & Cicely Delfina Harahap, 2024), praktik pengelolaan limbah industri yang tidak optimal dapat memicu berbagai permasalahan serius, termasuk pencemaran udara dan peningkatan emisi karbon. Hal ini tercermin dari insiden yang terjadi pada 20 Januari 2024, di mana PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar akibat bau menyengat dari limbah pabrik yang mengganggu kesehatan. Insiden ini berdampak pada siswa SD Tegal Ratu yang mengalami mual, pusing, hingga pingsan. Diduga, insiden ini terjadi karena gangguan mesin pabrik yang memicu pembakaran cerobong, sehingga memperburuk kualitas udara dan meningkatkan emisi karbon (TEMPO.CO, 2024).

Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat mengakibatkan sanksi administratif dan penurunan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Pratika, 2025). Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan limbah industri untuk mengurangi dampak kesehatan dan lingkungan, termasuk emisi gas berbahaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti sistem filtrasi udara yang efisien, serta melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kebocoran atau pembakaran yang tidak terkontrol. Selain itu, transparansi dalam pelaporan emisi karbon dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan sangat penting

untuk mengantisipasi dampak negatif lebih awal. Fenomena ini berpengaruh langsung pada kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan, mendorong Indonesia untuk meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17/2004 dan memperkuat komitmennya dengan Perpres No. 61/2011 dan 71/2011. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi kewajiban pemerintah, dunia usaha, dan pelaku sektor energi, sesuai dengan Pasal 4 Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejalan dengan itu, penerapan kerangka kerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi sangat relevan, karena ESG digunakan untuk mengevaluasi dampak perusahaan terhadap lingkungan dan berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan yang ingin berinvestasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsep ini juga digunakan untuk menilai dampak sosial dan keberlanjutan dari investasi, serta berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran investor akan pentingnya model bisnis yang berkelanjutan. Di Indonesia, ESG memiliki peranan penting karena tidak hanya mendukung kelangsungan usaha, tetapi juga memperkuat hasil keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ESG seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi investor dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan (P. W. Anggraini et al., 2024).

Aspek *governance* dalam ESG menunjukkan korelasi dengan struktur kepemilikan institusional, khususnya di sektor energi dan manufaktur. Pada perusahaan-perusahaan besar dengan kepemilikan terpusat (baik oleh negara

maupun swasta), sering ditemukan prioritas yang lebih tinggi pada pencapaian target keuangan jangka pendek dibandingkan pengembangan praktik lingkungan berkelanjutan.

Kepemilikan institusional memiliki peran dalam mendorong pengungkapan emisi karbon, Semakin besar proporsi kepemilikan oleh institusi, semakin kuat tekanan yang diberikan kepada perusahaan untuk membangun citra positif di mata para pemangku kepentingan melalui keterbukaan atas seluruh aktivitas yang dilakukan (Hermawan et al., 2018)

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan adanya potensi yang lebih besar dalam mengawasi kinerja manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh institusi, semakin optimal pula pemanfaatan aset perusahaan, sekaligus berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah terjadinya pemborosan oleh manajemen. Menurut (Aliyah, 2021) tingginya kepemilikan institusional akan memperkuat pengaruh dan kontrol mereka terhadap manajemen, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela informasi lingkungan, termasuk emisi karbon Penelitian oleh (Salsabilla et al., 2024). Meskipun penelitian (N. A. Putri et al., 2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, temuan lain (Cohen et al., 2023) menunjukkan bahwa tekanan dari investor institusional yang peduli terhadap isu iklim justru berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk lebih

transparan dalam mengungkapkan emisi karbon serta meningkatkan kinerja lingkungannya.

Dalam struktur *governance* ESG, komite audit memegang peran strategis setara dengan kepemilikan institusional dalam memastikan transparansi pengungkapan emisi karbon melalui fungsi pengawasannya yang krusial (May et al., 2023). Di Indonesia, eksistensi dan operasional komite audit diatur dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, termasuk ketentuan jumlah anggotanya sebagai bagian dari struktur tata kelola yang optimal. Selain itu pertemuan juga dilakukan guna memperkuat koordinasi agar pengawasan atas pelaporan keuangan serta penerapan tata kelola perusahaan dapat berjalan secara lebih optimal. Melalui tingginya kekerapan pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk mengungkapkan emisi karbon sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan *stakeholder*.

Komite audit berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan perlindungan kepentingan *stakeholder* (IKAI, 2012). Komite audit berperan krusial dalam mengawasi kinerja korporasi secara independen, menjamin objektivitas pemeriksaan dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keberlanjutan (GRI/TCFD), termasuk verifikasi strategi penurunan emisi karbon dan integrasi risiko lingkungan dalam audit risiko perusahaan.

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (Angelina & Handoko, 2023). Sedangkan menurut (Zada & Shinta Permata Sari,

2024) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kinerja lingkungan merupakan komponen integral dalam aspek Environmental (E) dari kerangka ESG, yang secara substantif merepresentasikan kontribusi aktif perusahaan dalam menjaga keberlanjutan ekologis sekaligus mengelola risiko lingkungan, mengingat aktivitas operasional perusahaan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan, seperti emisi dan bahan kimia yang berasal dari penggunaan bahan baku maupun peralatan (Anggraeni, 2015). Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan kinerja lingkungannya sekaligus menyampaikan informasi terkait aspek lingkungan secara transparan.

Penelitian (Habib Siregar et al., 2022) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan mencerminkan tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, dengan efisiensi pengelolaan sumber daya sebagai indikator kinerja yang baik. (Wahyudin, 2020) menambahkan bahwa kinerja lingkungan diwujudkan melalui program-program yang tidak hanya memastikan kepatuhan regulasi tetapi juga mendorong proses produksi berkelanjutan. Sebagai faktor kunci dalam tanggung jawab lingkungan perusahaan, kinerja lingkungan yang optimal berkontribusi pada pencapaian program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup (2018), peningkatan reputasi berdasarkan teori legitimasi, dan transparansi pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk akuntabilitas *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Budiwati, 2018), (Saptiwi, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh

secara signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Amaliyah & Solikhah, 2019), (Suhardi & Purwanto, 2015) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan berkinerja lingkungan positif tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat berupa penguatan legitimasi organisasi dan peningkatan stabilitas keuangan.

Kinerja keuangan mencerminkan kondisi finansial perusahaan yang dinilai melalui rasio keuangan (Esomar, 2021) dimana perusahaan dengan kinerja karbon kuat tidak hanya menunjukkan komitmen lingkungan tetapi juga membangun reputasi positif yang berdampak pada keberlanjutan finansial. Penelitian (Salsabila, 2025) membuktikan pengaruh signifikan kinerja keuangan terhadap pengungkapan emisi karbon, menegaskan relevansinya dalam strategi perusahaan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi.** Meskipun telah ada beberapa studi yang meneliti hubungan antara faktor-faktor tersebut dan pengungkapan emisi karbon, literatur yang ada masih memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam, terutama dalam konteks peran kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024, dengan harapan

dapat mengisi celah pengetahuan tersebut. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon?
5. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon?
6. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk memahami pengaruh komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Untuk memahami pengaruh kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Untuk memahami dan menganalisis kinerja keuangan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.
5. Untuk memahami dan menganalisis kinerja keuangan dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon.
6. Untuk memahami dan menganalisis kinerja keuangan dalam memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan agar dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon dengan kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi yang sedang ditempuh.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca dan dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan objek yang sama ataupun serupa.

3. Bagi Perusahaan dan Investor

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dalam mencapai aspek lingkungan yang aman , sosial yang adil, serta tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi informasi perusahaan. Bagi investor, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Dan diharapkan menjadi sarana informasi tambahan pertimbangan bagi para investor.